

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi merupakan seni, ilmu, sistem informasi yang didalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta adanya penginterpretasikan hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan (Taswan, 2015:5).

Menurut Rudianto (2006:7) akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.

Definisikan Akuntansi oleh Hery (2015:7) yaitu sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Disimpulkan bahwa Akuntansi merupakan sistem informasi yang disajikan dalam laporan keuangan guna menghasilkan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui suatu aktivitas dan kondisi suatu perusahaan serta berguna untuk

pengambilan keputusan.

2.1.1.1 Sistem dan Prosedur

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2016:4).

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart dalam bukunya *Accounting Information System* bahwa sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan (Rizki Ahmad Fauzi, 2017:2).

Prosedur menurut Ardios pada (Wijaya & Irawan, 2018) menyatakan bahwa Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa semua definisi sistem dan prosedur memiliki pengertian yang hampir sama dan tidak jauh berbeda dari definisi satu dengan yang lainnya yaitu dimana Sistem dan Prosedur adalah suatu rangkaian jaringan prosedur yang

melibatkan beberapa orang atau lebih yang dibuat atau disusun saling berhubungan guna mencapai suatu tujuan.

2.1.1.2 Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016:3) Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Sistem akuntansi adalah suatu organisasi terdiri dari metode dan catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggung jawaban bagi aktivitas dan kewajiban yang berkaitan (Bodnar dan Hopwood (2008:181)).

Definisi Sistem Akuntansi menurut Maulinarhadi (2010:1) adalah pengorganisasian dokumen atau formulir, catatan akuntansi yang dalam hal ini adalah jurnal, dan laporan dari tiap- tiap bagian yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen.

Disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna untuk menghasilkan informasi yang diperlukan manajemen sebagai alat penyelenggaraan pertanggungjawaban atau pengawasan untuk kelancaran aktifitas perusahaan dimasa mendatang.

2.1.1.3 Tujuan Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016:15) tujuan sistem akuntansi, yaitu :

- a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
- b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
- c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern.
- d. Untuk mengurangi biaya klerikel dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

2.1.1.4 Kas

Kas adalah alat pertukaran (pembayaran). Aset harus memenuhi dua kriteria agar dapat disebutkan kas. Pertama, harus siap digunakan setiap saat untuk membayar semua kewajiban yang ada sekarang. Kedua, harus bebas dari ikatan-ikatan apapun yang membatasi penggunaannya untuk melunasi kewajibannya. Slamet (2013:4).

Menurut Weygandt, et al (2007 : 462) kas adalah aktiva lancar yang paling berharga bagi perusahaan karena sifatnya yang likuid. Semua transaksi bermula dan berakhir ke penerimaan kas atau pengeluaran kas, tanpa tersedianya kas yang memadai, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. akibatnya kegiatan atau aktivitas perusahaan akan terhambat dan

tujuan tidak tercapai.

Disimpulkan bahwa kas adalah alat pembayaran yang harus siap dapat digunakan setiap saat atau siap pakai untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.

2.1.2 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Menurut Mulyadi (2016:425) Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun transfer.

Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah kewajiban perusahaan yang timbul akibat aktivitas suatu perusahaan. Tujuan utama sistem ini adalah untuk memastikan bahwa kreditur yang valid menerima jumlah terutang yang benar ketika kewajiban jatuh tempo. (Hall, 2007 : 330).

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas adalah kewajiban perusahaan untuk melaksanakan pengeluaran atau jumlah terutang baik berupa cek maupun transfer.

2.1.2.1 Unsur-unsur Sistem Akuntansi Pokok

Menurut Mulyadi (2016:3) ada lima unsur pokok di dalam sistem akuntansi, yaitu :

- a. Formulir, merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi, direkam (di dokumentasikan) di atas

secarik kertas. Contoh formulir adalah faktur penjualan, bukti kas keluar, dan cek.

- b. Jurnal, merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Contoh jurnal adalah jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum.
- c. Buku Besar (*general ledger*) terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.
- d. Buku Pembantu (*subsidiary ledger*) terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar. Contoh buku pembantu piutang yang berisi akun-akun pembantu piutang kepada tiap-tiap debitur.
- e. Laporan, hasil akhir akuntansi adalah laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, laporan harga pokok produksi, laporan beban pemasaran, laporan beban pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya.

2.1.2.1 Bagan Alir Sistem Pengeluaran Kas dengan Cek

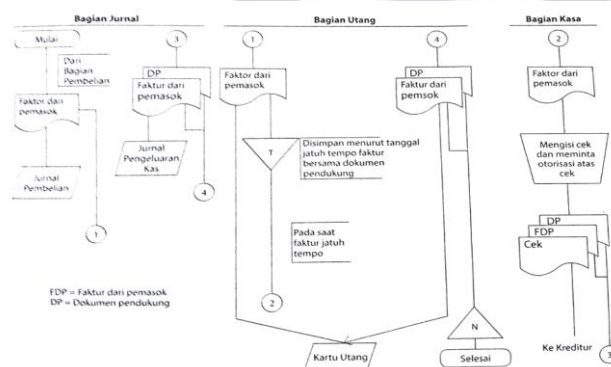
Sistem pengeluaran kas dengan cek menurut (Mulyadi, 2016:436) dibagi menjadi empat macam yaitu sebagai berikut :

- a. Bagan alir dokumen sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dalam *account payable system*. *Account payable system* merupakan sistem pembayaran utang di mana pencatatan dilakukan tidak membutuhkan *voucher* (bukti kas keluar) tetapi berdasarkan transaksi pembelian yaitu faktur dari pemasok dicatat ke dalam jurnal pembelian. Faktur dari pemasok digunakan untuk dasar pembuatan cek. Jurnal pembelian yang digunakan adalah :

Persediaan xxx
 Utang Dagang xxx

Apabila terjadi pengeluaran kas akibat pelunasan atas akun utang maka jurnal atas transaksi tersebut adalah:

Utang dagang xxx
 Kas xxx



Gambar 2.1

Prosedur Pencatatan Utang Dengan *Account Payable System* dan Pengeluaran dengan Cek

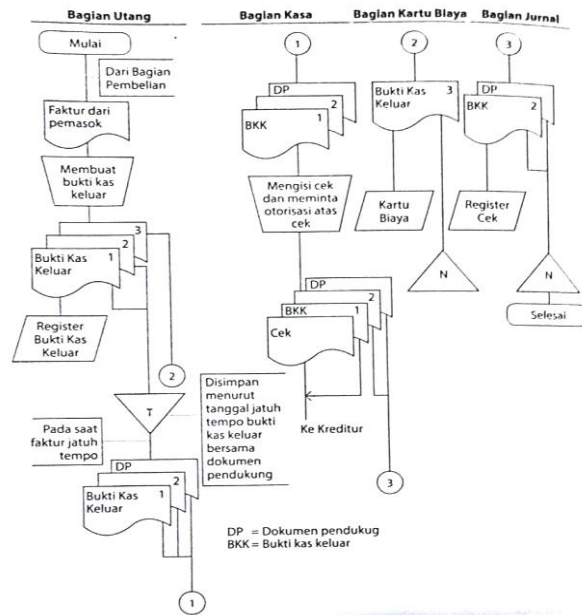
Sumber : Sistem Akuntansi, Mulyadi 2016

b. Bagan alir dokumen *one-time voucher payable system* dengan *cash basis*. *One-time voucher payable system* dengan *cash basis* merupakan sistem pembayaran utang berbasis kas di mana pencatatannya menggunakan *voucher* (bukti kas keluar). Apabila bagian utang telah menerima faktur dari pemasok maka bagian utang akan mengarsipkan dokumen untuk sementara, setelah jatuh tempo maka bagian utang baru membuat bukti kas keluar dan dicatat ke dalam register bukti kas keluar. Bukti kas keluar akan langsung diserahkan ke bagian kasa untuk dibuatkan cek. Jurnal yang digunakan untuk transaksi tersebut adalah :

Persediaan	xxx
Bukti kas keluar yang akan dibayar	xxx

Namun apabila terjadi pengeluaran kas akibat pelunasan transaksi di atas maka jurnal yang digunakan adalah :

Bukti kas keluar yang akan dibayar	xxx
Kas	xxx



Gambar 2.2

Prosedur Pencatatan Utang dengan *Voucher Payable System Accrual Basis* dan Pengeluaran Kas dengan Cek

Sumber : Sistem Akuntansi, Mulyadi 2016

- c. Bagan alir dokumen *built up voucher payable system*. *Built up voucher payable system* merupakan sistem pembayaran utang di mana pencatatannya menggunakan *voucher* (bukti kas keluar). Dalam *built up voucher payable system* satu bukti kas keluar yang memiliki pemasok yang sama bisa digunakan untuk lebih dari satu faktur. Biasanya sistem ini digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur secara periodik, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian persediaan dalam sistem ini adalah :

Persediaan xxx
 Bukti kas keluar yang akan dibayar xxx

klaim yaitu suatu permintaan salah satu dari dua pihak yang mempunyai ikatan agar haknya terpenuhi. Satu dari dua pihak yang melakukan ikatan tersebut akan mengajukan klaimnya kepada pihak lainnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama oleh kedua pihak.

Dapat disimpulkan bahwa klaim adalah suatu permintaan dari salah satu pihak diantara dua pihak yang bersangkutan dan bertujuan untuk mengajukan haknya kepada pihak lainnya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

2.1.3.1 Pengertian Jaminan Sosial

Jaminan Sosial (*Social Security*) yaitu memberikan perlindungan baik kepada individu, keluarga atau komunitas dari berbagai resiko kehidupan yang tidak dapat diketahui sebelumnya seperti, bencana alam, ekonomi, ataupun musibah. Pengertian jaminan sosial yang lain dikemukakan oleh Agusmindah bahwa jaminan sosial yaitu bentuk perlindungan bagi pekerja atau buruh yang berkaitan dengan penghasilan berupa materi guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan dan menyebabkan seseorang tidak dapat bekerja, ini diistilahkan juga sebagai perlindungan ekonomi.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu badan hukum yang dibentuk guna menyelenggarakan program jaminan sosial. Dana jaminan sosial ini adalah dana amanah milik seluruh peserta yang merupakan anggota iuran beserta dengan hasil pengembangannya

yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggara program jaminan sosial.

Pesertanya adalah setiap orang atau individu, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang sudah membayar iuran. Iuran ini sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, atau pemerintah. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima sejumlah upah, gaji, maupun imbalan dengan dalam bentuk apapun.

A. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap; Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015.

B. Jaminan Pensiun (JPN)

Jaminan Pensiun adalah manfaat sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia; Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015.

C. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat

peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja; Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015.

D. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja; Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015.

2.1.3.2 Asas, Tujuan, Dan Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program yang bertujuan memberi jaminan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Program ini, setiap peserta diharapkan dapat memenuhi dasar hidup yang layak jika terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya suatu pendapatan, karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan 9 prinsip (sumber dari website DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional)), yaitu :

1. Kegotong-royongan.
2. Nirlaba.
3. Keterbukaan.

4. Kehati-hatian.
 5. Akuntabilitas.
 6. Portabilitas.
 7. Kepesertaan bersifat wajib.
 8. Dana amanat.
1. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) digunakan seluruhnya untuk penembangan program dan untuk sebesar- besarnya kepentingan peserta.

2.1.3.3 Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)

Manfaat jaminan hari tua (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Tahun 2017) dibayarkan secara penuh ketika peserta:

1. Mencapai usia 56 tahun.
2. Mengalami cacat total tetap.
3. Berhenti bekerja (Mengundurkan diri, Mengalami pemutusan hubungan kerja atau meninggalkan wilayah NKRI untuk selamanya).
4. Meninggal dunia.

2.1.3.4 Manfaat Jaminan Pensiun (JPN)

Manfaat jaminan pensiun (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Tahun 2017) terdiri dari :

1. Manfaat pensiun hari tua.
2. Manfaat pensiun cacat.
3. Manfaat pensiun janda atau duda.

4. Manfaat pensiun anak.
5. Manfaat pensiun orang tua.

Jaminan pensiun dapat dibayarkan secara berkala atau sekaligus. Manfaat pensiun berkala ini diberikan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun dan telah memiliki masa iuran paling singkat 15 tahun.

2.1.3.5 Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Manfaat jaminan kecelakaan kerja (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Tahun 2017) ini berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Dimana perlindungan resiko kecelakaan kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang, ditempat berkerja, dan perjalanan dinas.

2.1.3.6 Manfaat Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Tahun 2017) memberikan manfaat yaitu berupa uang tunai yang dibayarkan kepada ahli waris apabila peserta tersebut meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif akibat kecelakaan kerja. Jaminan kematian ini juga memberikan santunan beasiswa yang diberikan kepada anak dari peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 3 tahun.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini.

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

N O	Nama Peneliti Tahun	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Peneliti : Fransher Dady, Ventje Ilat, Winston Ponto. Tahun : 2017	Analisis Sistem Akuntansi dan Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Kematian Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Manado.	Metode Penelitian : Metode Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi dan Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Kematian yang diterapkan oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado telah efektif karena telah sesuai dengan teori yang ada. Peneliti atau penulis telah membandingkan teori Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas (Mulyadi, 2014:513) dengan Sistem Akuntansi dan Prosedur Pembayaran Klaim JKM (Jaminan Kematian) yang membentuk Pengeluaran Kas yang diterapkan pada PT. Taspen Kantor Cabang Manado. Kemudian peneliti juga memberikan saran dimana Pt. Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado sebaiknya sebelum berkas peserta masuk pada

				bagian bidang pelayanan sebaiknya diteliti terlebih dahulu untuk mengetahui apakah berkas tersebut sudah lengkap dan siap di proses atau belum.
2	<p>Peneliti : Putri Santi Yudhawati, Achmad Husaini</p> <p>Tahun : 2017</p>	<p>Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Pengajuan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi pada Pt Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun)</p>	<p>Metode Penelitian Deskriptif atau Descriptive Research</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengendalian intern terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas atas pengajuan pembayaran klaim asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern yang ada. Kemudian masih terdapat nasabah yang nilai klaimnya tidak sesuai dengan polis dan perusahaan tidak transparan memberikan informasi mengenai perjanjian yang disepakati antara tertanggung dan penanggung membuat proses pengajuan pembayaran klaim kurang berjalan dengan baik.</p>
3	<p>Peneliti : Chicilia C. Tasikrede, Jullie. J, I Gede Suwetja</p> <p>Tahun : 2018</p>	<p>Analisis Sistem Akuntansi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Pt. Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri</p>	<p>Penelitian kualitatif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi klaim jaminan kecelakaan kerja pada PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (persero) Kantor Cabang Manado telah efektif, telah mengikuti SOP (Standart Operating</p>

		(PERSERO) Kantor Cabang Manado		Procedure) sebagai acuan dan sesuai dengan kajian teori.
4	Peneliti : Jumrah Riah, Firman Menne, Arifuddin Mane Tahun : 2018	Analisis Ssistem Akuntansi Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaa n Cabang Makassar	Metode Penelitian: Metode Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pembayaran Klaim Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makasar sudah baik, hal ini dibuktikan dengan sistem akuntansi pembayaran jaminan hari tua terdiri dari bagian yang terkait dalam proses pembayaran yaitu Customer Service, Verifikasi Jaminan, Verifikasi Akuntansi, Keungan dan Kasir. Dokumen yang digunakan pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu pengajuan klaim, penetapan jaminan, bukti pembayaran jaminan, voucher, cek dan nota transfer. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu bukti pengeluaran kas yang diisi setiap pengeluaran kas berlangsung dan general ladge. Jaringan prosedur yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua terdiri dari prosedur pengajuan jaminan, prosedur penetapan jaminan, prosedur pembuatan cek dan nota transfer jika jumlah uang yang

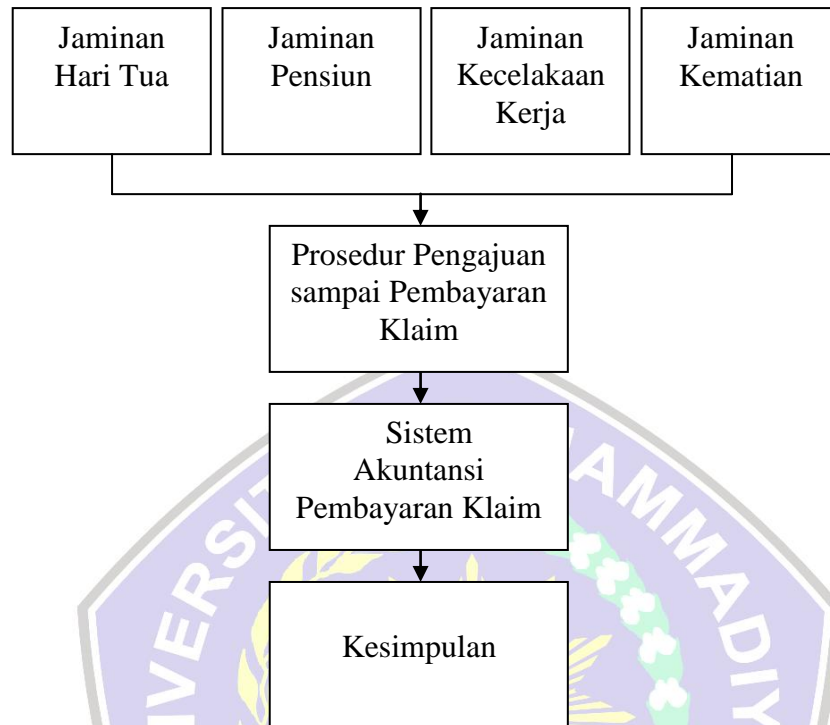
				ditransfer dan prosedur pembayaran tunai maupun transfer
5	Peneliti : Rayyan Firdaus, Nurul Akmal Tahun :2019	Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwasraya Persero Area Lhokseumawe)	Metode Penelitian: Kualitatif Deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pembayaran klaim asuransi jiwa untuk tingkat pelayanan dalam pembayaran klaim sesuai pernyataan nasabah masih belum tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan sebagaimana mestinya, dalam hal ini pelayanan ketepatan waktu selalu menjadi keluhan para nasabah terkait kepuasan pelanggan asuransi jiwa raya dala pembayaran klaim terhadap pemegang polis perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Area Lhokseumawe sehingga pelayanan belum dapat memuaskan para nasabah.

Sumber : Dari beberapa Jurnal (2021)

2.1.4.1 Kerangka Berfikir

Dalam mengetahui adanya sistem informasi akuntansi pada bpjs ketenagakerjaan cabang madiun diperlukan adanya prosedur-prosedur pengajuan hingga pembayaran klaim.

Uraian kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.4
Kerangka Berpikir

Untuk melakukan atau mengklaim jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian tenaga kerja yang sudah menjadi peserta harus melalui beberapa tahapan klaim. Disini juga diperlukan adanya sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi mengenai sistem klaim jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk memudahkan para peserta dalam melakukan klaim dan waktu yang tepat untuk melakukan klaim. Dari kerangka pemikiran tersebut, penulis mendefinisikan yaitu bahwa dengan adanya pemanfaatan sistem klaim akan sangat memudahkan bagi tenaga kerja yang telah menjadi peserta dalam melakukan klaim.

Uraian kerangka berfikir sebagai berikut :

- a. Penjelasan mengenai program Jaminan Hari tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun.
- b. Penjelasan mengenai prosedur pengajuan sampai dengan Pembayaran klaim.
- c. Menjelaskan sistem akuntansi pembayaran klaim mulai dari fungsi terkait, dokumen yang digunakan sebagai persyaratan klaim dari jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta catatan akuntansi yang digunakan.
- d. Menyimpulkan hasil menganalisis sistem akuntansi pembayaran klaim jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

